



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana	21
1. Sistem Peradilan Pidana secara Umum	21
2. Sistem Peradilan Pidana dalam Lingkungan Peradilan Umum	23
3. Sistem Peradilan Pidana dalam Lingkungan Peradilan Militer	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	32



1. Penyidikan secara Umum	32
2. Penyidikan menurut KUHAP	34
3. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Pidana Koneksitas	37
1. Yurisdiksi Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer	37
2. Pengertian dan Perkembangan Koneksitas	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Bahan Penelitian	53
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	58
D. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Penerapan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas .	63
1. Pengaturan mengenai Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas	63
2. Penerapan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP serta Pasal 198 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.....	70
a. Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas	70
1) Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter Angkut <i>Agusta Westland-101</i> TNI Angkatan Udara atas nama Tersangka Irfan Saleh Kurnia, dkk.	71



2) Kasus Korupsi Pendanaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) atas nama Tersangka Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M. dkk.	73
3) Kasus Pembunuhan Berencana atas nama Sersan Mayor Toegiran dan Umar Sa'ad Martono.....	74
4) Kasus Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) atas nama Tersangka Kolonel Czi Ngadimin DS, S.H. dkk.	78
5) Kasus Korupsi Pembuatan <i>Technical Assistance Contract</i> (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas atas nama Tersangka Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita dkk.....	81
b. Analisis Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas	91
1) Analisis Pembentukan Tim Tetap Penyidik Koneksitas.....	91
2) Analisis Pelaksanaan Wewenang Penyidikan.....	107
B. Prospek Pengaturan Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas di Masa yang Akan Datang	110
1. Pembaruan Hukum Pidana	110
2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penyidikan Perkara Pidana	120
a. Sinkronisasi Vertikal antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	126



b. Sinkronisasi Vertikal antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	128
c. Sinkronisasi Horizontal antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	134
d. Sinkronisasi Horizontal antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	141
3. Kelemahan Pengaturan dan Kendala Penerapan Ketentuan mengenai Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	149
4. Urgensi Perkara Pidana Koneksitas.....	153
5. Gagasan Pembaruan Pengaturan mengenai Penyidikan Perkara Pidana	167
BAB V PENUTUP	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182